



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP
KPP.....

Jalan XXX
Kotak Pos XXX

Telepon XXX
Fax XXX

BERITA ACARA
PENYELESAIAN PEREKAMAN FISIK KETETAPAN,
VALIDASI DAN REKONSTRUKSI DATA PIUTANG PAJAK
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala KPP
2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Seksi

selaku Pejabat yang bertanggung jawab atas validitas data hasil perekaman Fisik Ketetapan yang sudah direkam pada Aplikasi SiMIAP menyatakan bahwa seluruh Fisik Ketetapan yang masih berstatus Piutang Pajak per 30 Juni 2007 sudah seluruhnya direkam pada Aplikasi SiMIAP sebagaimana data yang diserahkan kepada Tim Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Subdit Penagihan, Tim Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan pada tanggal sesuai surat pernyataan ini dibuat, dan telah sesuai dengan kondisi Piutang Pajak KPP kami.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa masih ada Fisik Ketetapan yang belum direkam atau pada hasil perekaman pada aplikasi SiMIAP tidak sesuai dengan keterangan keberadaan Fisik Ketetapan tersebut, maka kami bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab dan ditandatangani di depan Kepala Bidang P4 dan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP.

Kepala Kantor

Kepala Seksi

Materai 6.000

.....
NIP.

.....
NIP.

Kepala Bidang P4

Kepala Seksi Bimbingan Penagihan

.....
NIP.

.....
NIP.

PROFIL 200 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP
3. Alamat
4. Nomor Telepon

B. PENANGGUNG PAJAK

1. DAFTAR PEMEGANG SAHAM

NAMA/NPWP	ALAMAT	KEPEMILIKAN		
		JUMLAH SAHAM	NILAI	%

2. DEWAN DIREKSI

NAMA/NPWP	JABATAN	ALAMAT

3. DEWAN KOMISARIS

NAMA/NPWP	JABATAN	ALAMAT

4. PENGURUS LAIN (YANG TIDAK TERCANTUM DALAM AKTE PENDIRIAN/AKTE PERUBAHAN)
 yang mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dlsb.

NAMA/NPWP	JABATAN/WEWENANG	ALAMAT

5. KUASA/KURATOR/LIKUIDATOR

NAMA/NPWP	ALAMAT	KETERANGAN

C. DAFTAR HARTA

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	DOKUMEN/BUKTI KEPEMILIKAN		KET
				JENIS	STATUS (DIAGUNKAN/TIDAK)	

D. RINCIAN TUNGGAKAN

NO.	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	KETETAPAN			
			JENIS	NOMOR	TANGGAL	NILAI (Rp)

E. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN

KETETAPAN		UPAYA HUKUM		KEPUTUSAN/PUTUSAN	
NOMOR	NILAI (Rp)	TANGGAL	JENIS UPAYA	TANGGAL	ISI

F. TINDAKAN PENAGIHAN YANG TELAH DILAKUKAN

1. PENAGIHAN PERSUASIF EDUKATIF

SURAT PANGGILAN			PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK	
NOMOR	TANGGAL	HASIL	TANGGAL	HASIL

2. PENAGIHAN AKTIF REPRESIF

KETETAPAN	SURAT TEGURAN	SURAT PAKSA	TINDAKAN PENAGIHAN LAIN

G. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN

.....

H. PENDAPAT ATAS TUNGGAKAN DAN KONDISI WAJIB PAJAK

1. DASAR PENETAPAN

.....

2. KEMUNGKINAN TERTAGIH

.....

3. KONDISI WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK SAAT INI

.....

4. KRITERIA KUALITAS TUNGGAKAN

.....

I. SARAN DAN MASUKAN BERKAITAN DENGAN MASALAH WAJIB PAJAK

.....

....., 20...
Kepala Seksi Penagihan,

Nama
NIP

**LAPORAN EVALUASI
 KINERJA PENAGIHAN TAHUN 2010
 KANWIL DJP XXXXXX**

A. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-50/PJ/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, maka dilakukan evaluasi atas kinerja penagihan yang sudah dilakukan selama tahun 2010 sebagai salah satu bahan masukan untuk menentukan kebijakan di tahun selanjutnya. Evaluasi Kinerja Penagihan dibagi dalam 4 (empat) pokok bahasan sebagai berikut :

- a. Evaluasi Tertib Administrasi
- b. Evaluasi Realisasi Pencairan Piutang Pajak
- c. Evaluasi Kegiatan Penagihan
- d. Evaluasi Validasi dan Rekonstruksi Data Piutang Pajak

B. EVALUASI TERTIB ADMINISTRASI

Berdasarkan data Laporan Penagihan tahun 2010 dari seluruh KPP yang sudah diterima Kanwil DJP XXXXXX, dalam penyampaian laporan sebanyak ... KPP termasuk dalam kategori Kanwil patuh dan sisanya ... KPP termasuk kategori kurang patuh dengan rincian pelaporan yang sudah disampaikan sebagai berikut:

**Table 2.1
 Tertib Pengiriman Laporan Perkembangan Piutang Pajak
 Periode Januari s.d. Desember 2010**

NO.	KPP	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	KPP A												
2	KPP B												
3	KPP C												

Keterangan Warna	Hijau	Tepat Waktu
	Kuning	Terlambat
	Merah	Belum/Tidak Menyampaikan

**Table 2.2
 Tertib Pengiriman Laporan Kegiatan Penagihan
 Periode Januari s.d. Desember 2010**

NO.	KPP	TRIWULAN			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KPP A				
2	KPP B				
3	KPP C				

Keterangan Warna	Hijau	Tepat Waktu
	Kuning	Terlambat
	Merah	Belum/Tidak Menyampaikan

C. EVALUASI DAN ANALISIS REALISASI PENCAIRAN PIUTANG PAJAK

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, pertumbuhan piutang pajak Kanwil DJP XXXXXX dapat digambarkan secara rinci sebagai berikut :

Table 3.1
Data Perkembangan Piutang Pajak
Periode 2009 s.d. 2010

dalam jutaan

No.	KPP	SALDO AWAL		TARGET		%	
		2010	2009	2010	2009	2010	2009
1	A	8,182,164	4,763,757	3,837,653	2,712,450	47%	57%
2	B	1,525,062	652,414	1,009,465	564,563	66%	87%
4	C			3,500			
Total		9,707,226	5,416,171	4,850,618	3,277,013	50%	61%

Table 3.2
Data Perkembangan Piutang Pajak
Periode 2009 s.d. 2010

dalam jutaan

No.	KPP	TARGET		REALISASI		%	
		2010	2009	2010	2009	2010	2009
1	A	3,837,653	2,712,450	2,525,247	1,372,949	66%	51%
2	B	1,009,465	564,563	2,168,916	917,777	215%	163%
4	C	3,500		7,412		212%	
Total		4,850,618	3,277,013	4,701,574	2,290,726	97%	70%

Analisis :

(contoh)

1. Capaian realisasi pencairan piutang pajak terhadap target pencairannya pada periode tahun 2010 mencapai ... %
2. Capaian realisasi pencairan piutang pajak terhadap target pencairannya untuk periode tahun 2009 mencapai ... %
3. Perbandingan realisasi pencairan piutang pajak tahun 2010 terhadap 2009 terlihat ada kenaikan capaian realisasi pencairan sebesar juta rupiah atau sebesar ... %
4. Pertumbuhan realisasi pencairannya terlihat ada penurunan sebesar ... %

D. EVALUASI KEGIATAN PENAGIHAN

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, realisasi kegiatan penagihan yang menyangkut Penagihan Persuasif dan Penagihan Aktif Kanwil DJP XXXXXX dapat digambarkan sebagai berikut :

Table 4.1
Data Pelaksanaan Kegiatan Penagihan
Periode 2010

No.	KPP	PERSUASIF	KEGIATAN PENAGIHAN					
			ST	SP	SPMB	BLOKIR	CEGAH	SANDERA
1	A	-	615	284	31	31	-	-
2	B	-	143	60	-	5	-	-
4	C	-	731	139	3	-	-	-
Total		-	1,489	483	34	36	-	-

Table 4.2
Data Pelaksanaan Kegiatan Penagihan
Periode 2010

No.	KPP	PERSUASIF	KEGIATAN PENAGIHAN					
			ST	SP	SPMB	BLOKIR	CEGAH	SANDERA
1	A	-	615	284	31	31	-	-
2	B	-	143	60	-	5	-	-
4	C	-	731	139	3	-	-	-
Total		-	1,489	483	34	36	-	-

Analisis :
(contoh)

Dari tabel kedua tabel tersebut di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan/penurunan kegiatan penagihan, kecuali pada KPP Berdasarkan realisasi pencairan Kanwil XXXXXX pada tahun 2010 yang lebih tinggi/rendah dibanding tahun 2009, dapat diketahui bahwa tindakan penagihan memang memiliki keterkaitan erat dengan realisasi pencairan. Khusus untuk KPP ..., walaupun tindakan penagihan sudah ditingkatkan ternyata realisasi pencairan malah menurun. Kemungkinan, terdapat Wajib Pajak di wilayah kerja KPP ... tersebut yang tidak lagi terdaftar pada tahun 2010 karena pindah atau

E. EVALUASI VALIDASI DAN REKONSTRUKSI DATA PIUTANG PAJAK

Table 5.1
Data Hasil Validasi dan Rekonstruksi Piutang Pajak

Lbr. dan US \$ dalam satuan penuh, Rupiah dalam jutaan

No.	KPP	Data cfm. Sistem			Data cfm. SiMIAP		
		Lbr.	Rupiah	US \$	Lbr.	Rupiah	US \$
1	A	11,485	28,143	-	7,425	15,887	-
2	B	20,733	55,894	-	15,134	23,351	-
3	C	17,835	9,322	-	21,482	14,510	-
Total		50,053	93,359	-	44,041	53,748	-

Analisis :
(contoh)

Dari tabel 5.1 di atas terlihat bahwa secara umum, nilai lembar dan nominal ketetapan berdasarkan fisik ketetapan lebih besar/kecil dibandingkan data pada sistem. Hal ini dapat dipahami bahwa ada ketetapan yang terdapat dalam data sistem ternyata sudah lunas. Namun, apabila diteliti per KPP, terlihat bahwa untuk KPP A, KPP B, dan KPP C jumlah lembar ketetapan berdasarkan fisik lebih tinggi/rendah dibandingkan data sistem. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan jumlah Wajib Pajak berdasarkan sistem dengan jumlah Wajib Pajak berdasarkan data KPP.

Table 5.2
Rekonstruksi Piutang Pajak

(rupiah dalam jutaan)

NO.	KPP	PIUTANG PASTI (FISIK KETETAPAN ADA)				PIUTANG DALAM PENELITIAN		PERSENTASE	
		DI SIDJP/SIPMOD						PIUTANG PASTI	PIUTANG DALAM PENELITIAN
		ADA		TIDAK ADA		FISIK KETETAPAN TIDAK ADA			
		LBR	RUPIAH	LBR	RUPIAH		LBR		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	A	21,617	7,135	5,759	2,149	2,866	7,240	91%	9%
2	B	8,137	10,890	5,782	13,615	1,440	3,107	91%	9%
3	C	5,868	8,511	3,362	1,773	451	390	95%	5%
	KANWIL	221,577	203,439	36,262	51,913	93,782	190,052	74%	26%

Analisis :
(contoh)

Berdasarkan hasil perekaman fisik ketetapan pajak pada Program SiMIAP dapat diketahui bahwa jumlah lembar fisik ketetapan yang sudah direkam melebihi/kurang dari jumlah ketetapan yang ada di sistem. Data ketetapan sesuai dengan sistem adalah sebanyak ketetapan dengan nilai Rp juta, sedangkan yang direkam di Program SiMIAP sebanyak ketetapan dengan nilai Rp juta.

Dari data yang sudah direkam di SiMIAP dapat dibedakan menjadi data piutang pasti yaitu piutang yang fisik ketetapannya ada dan piutang dalam penelitian yaitu piutang yang fisik ketetapannya tidak ada. Untuk piutang pasti jumlah ketetapan adalah ketetapan dengan nilai Rp juta atau sekitar ... % dari total ketetapan yang direkam. Jumlah ketetapan tersebut terdiri dari ketetapan yang ada di sistem (fisik ketetapan dan sistem ada) dan ketetapan yang tidak ada di sistem (fisik ada, sistem tidak ada).

Sedangkan jumlah piutang dalam penelitian sebanyak lembar dengan nilai ketetapan sebesar juta atau sekitar ... % dari ketetapan yang direkam.

Perlu perhatian khusus adalah KPP ... karena jumlah piutang dalam penelitian lebih besar daripada piutang pasti yaitu ... % berbanding ... %.

F. KESIMPULAN

(Contoh)

Realisasi pencairan piutang pajak mengalami kenaikan/penurunan pada Kantor Wilayah DJP XXXXXX. Hal ini berkaitan erat dengan kenaikan/penurunan tindakan penagihan yang dilakukan.

G. YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH KANWIL DJP XXXXXX TERHADAP KONDISI KPP-KPP DI WILAYAH KERJANYA
(Contoh)

KPP-KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP XXXXXX perlu meningkatkan kembali tindakan penagihan. Berdasarkan tabel 4.2. terlihat bahwa upaya penyitaan dan pemblokiran sudah dianggap cukup/masih sangat kurang. Kanwil DJP XXXXXX sudah melakukan :

- a.
- b.
- c.

dst

SERAGAM DINAS JURUSITA PAJAK



Keterangan atribut :

1. Nama Jurusita diletakkan di atas saku kanan;
2. Tulisan "Jurusita" diletakkan di atas saku kiri;
3. Name Tag dikaitkan di saku kiri;
4. Logo Direktorat Jenderal Pajak diletakkan di bahu kanan;
5. Nama Kantor diletakkan di bahu kiri.

KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS SERAGAM

1. Kemeja berwarna abu-abu dan/atau biru (satu pasang atau lebih);
2. Celana panjang atau rok berwarna abu-abu tua/gelap (untuk kemeja abu-abu) atau biru tua/gelap (untuk kemeja biru);
3. Topi berwarna hitam (untuk pria atau wanita yang tidak berjilbab);
4. Ikat pinggang berwarna hitam;
5. Sepatu hitam dengan kaos kaki berwarna hitam atau abu-abu/biru tua sesuai warna kemeja.